

PENGARUH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT

Rd. Ade Purnawan^{1*}, Eka Santika², Nurbudiwati³, Resmi Afifah Fadilah⁴, Aji Abdul Wahid⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Garut, Garut, Indonesia

*Korespondensi : rd.purnawan@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Garut terkait laporan barang milik daerah di Kabupaten Garut. Pertama, terkait dengan tidak relevan dan tidak andalnya pencatatan aset yang dicantumkan dalam laporan keuangan daerah. Kedua, Pensertifikatan aset berupa lahan milik pemerintah Kabupaten Garut yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data primer yaitu sumber utama dari penyebaran kuesioner dan wawancara. Populasi penelitian mencakup 75 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tersebar di Kabupaten Garut. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan Sampel Jenuh yaitu sebesar 75 SKPD. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dengan kontribusi sebesar 81% sementara 19% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pengelolaan Barang Milik Daerah; Kualitas Laporan Keuangan; Satuan Kerja Perangkat Daerah.

ABSTRACT

Problems in the financial statements of the Garut Regency Government are related to the reporting of regional government assets in Garut Regency. First, there are issues concerning the irrelevance and unreliability of asset recording presented in the regional financial statements. Second, the certification of land assets owned by the Garut Regency Government has not been supported by valid ownership certificates. The purpose of this study is to examine the effect of regional asset management on the quality of the financial statements of the Garut Regency Government. The research approach used in this study is a quantitative method with primary data obtained mainly through questionnaires and interviews. The research population consists of 75 Regional Apparatus Work Units (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) distributed throughout Garut Regency. The research sample was determined using a saturated sampling technique, involving all 75 SKPD. The hypothesis testing results indicate that regional asset management (X) has a positive and significant effect on the quality of financial statements (Y), with a contribution of 81%, while the remaining 19% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords : *Regional Asset Management; Financial Statement Quality; Regional Apparatus Work Units (SKPD).*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat untuk akuntabilitas dan juga transparansi yang baik dari waktu ke waktu, pemerintah harus mampu menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi (Pranata, 2021). Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sebagai penyalur untuk berbagi informasi terhadap masyarakat sebagai hak publik. Untuk tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, upaya konkret terus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu dengan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Vidyasari, 2021).

Sudaryono et al., (2017) menjabarkan bahwa kualitas pelaporan keuangan menjadi evaluasi atau penjabaran hasil proses identifikasi, pengukuran dan pencatatan transaksi ekonomi mewakili kegiatan yang berhubungan dengan uang pada suatu unit akuntansi pemerintah daerah, yang digunakan untuk melaporkan pengelolaan keuangan. Berbagai pemangku kepentingan menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk membuat kebijakan (Alrahim & Wibowo, 2022). Oleh karena itu, informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) harus sesuai dengan kebutuhan

pengguna dan bermanfaat untuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi yang dikandungnya memenuhi karakteristik kualitatif berikut: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan.

.Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai laporan keuangan pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas. (Hanifah et al., 2019). Namun, opini WTP tidak selalu mencerminkan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh, karena opini tersebut hanya menilai kepatuhan terhadap standar dan peraturan, bukan aspek kualitas lainnya (Rahayu & Fidiana, 2018). Artinya, meskipun suatu daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, terdapat masalah lain, seperti pengelolaan aset yang belum optimal, sistem pengendalian internal yang belum sepenuhnya berjalan baik dan lain-lain yang berikaitan dengan pengelolaan non keuangan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Mulyati et al. (2020), Irafah et al. (2020), Yanti & Made (2020), Dewi et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi banyak faktor yaitu pengelolaan barang milik daerah/aset daerah, sistem pengendalian internal,

kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, penerapan standar akuntansi. Penyusunan laporan keuangan bergantung pada pengelolaan aset daerah. Menurut PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian adalah semua bagian dari pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan akuntabel. Berdasarkan penjelasan ini, adapun salah satu pemerintah daerah yang

masih belum optimal dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Sejalan dengan hal tersebut ditemukan beberapa isu permasalahan dalam laporan keuangan terkait laporan barang milik daerah di Kabupaten Garut. Pertama, terkait dengan tidak relevan dan tidak andalnya pencataan aset yang dicantumkan dalam laporan keuangan daerah. Berikut merupakan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat koreksi dan juga salah saji dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan

NO	Jenis Barang Milik Daerah	Hasil Pemeriksaan BPK
1	Tanah	Tidak memuat informasi secara lengkap dan jelas atas luas, letak, dan penggunaan dari tanah tersebut
2	Peralatan dan Mesin	Berupa kendaraan bermotor yang tidak memuat informasi yang jelas terkait nomor mesin, nomor polisi serta nomor BPKB Barang rusak berat tercatat baik begitu sebaliknya
3	Gedung dan Bangunan	Tidak memuat informasi luas lantai, letak dan alamat bangunan, tanggal dan nomor dokumen gedung

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2024

Dari uraian di atas, berikut dilampirkan berupa data Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin yang rusak berat tetapi masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kondisi baik.

Tabel 2. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat Tetapi masih tercatat pada KIB dengan Kondisi Baik di Kecamatan Cisurupan

NO	Jenis Barang	Merk	Tahun Perolehan
1	Printer	Epson L 120	2015
2	Televisi	Samsung	2016
3	Mesin Ketik Elektronik	Brother	2014
4	Brangkas	Daichiban	2014
5	Note Book	Asus	2014
6	Laptop	Toshiba	2013
7	Dispenser	Asatron	2015
8	Mimbar/Podium		2009
9	Sound System		2003
10	Kursi Putar	Rakuda	2016

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2024

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 menjelaskan bahwa aset tetap tersebut belum tercatat dengan baik sehingga tidak memberikan informasi yang relevan dan juga andal. Jika pencatatan tidak dilakukan dengan lengkap, maka aset sulit untuk diidentifikasi karena kurangnya informasi yang diperoleh. Menurut nara sumber selaku pegawai di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah bagian Tenaga Implementasi di BPKAD Kabupaten Garut menyatakan hal tersebut sering ditemukan di tiap-tiap SKPD dan Kecamatan, masalah tersebut terbukti ketika ada pemeriksaan dari BPK yang mengakibatkan ketidak akuratan data yang ada dengan yang sebenarnya. Kedua, Pensertifikatan aset berupa lahan milik pemerintah Kabupaten Garut. Menurut narasumber Bidang Barang Milik Daerah di BPKAD Kabupaten Garut menyatakan bahwa untuk pensertifikatan masih banyak aset berupa tanah yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan. (Eka, Hasil Wawancara, 16 Oktober 2024).

Muncul beberapa pertanyaan penting yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Pertama, adanya kekhawatiran terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Garut saat ini. Data yang menunjukkan kurangnya inventarisasi yang akurat, pemeliharaan yang tidak teratur, dan penggunaan aset yang kurang efisien dapat menyebabkan inkonsistensi dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan daerah (Kaomaneng et al., 2023). Hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Pengelolaan barang milik daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Garut. Barang milik daerah mencakup aset tetap, inventaris, dan barang lainnya yang memerlukan pengelolaan yang efisien dan akurat untuk mencerminkan nilai sebenarnya dalam laporan keuangan (Afandi, 2013). Proses manajemen yang

baik mencakup identifikasi sistematis, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Apabila Barang milik daerah dikelola dengan baik, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih valid dan dapat diandalkan, sehingga membantu pemerintah dan pemangku kepentingan mengambil keputusan yang lebih tepat. Menurut Mormahadi Djanegara (2017) mengatakan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh pengelolaan aset yang baik. Ini sejalan dengan Bambang Pamungkas (2014), yang menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang baik adalah kebutuhan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Lebih lanjut, transparansi pengelolaan barang milik daerah memudahkan auditor untuk melakukan penelaahan sehingga pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan Firmansyah et al. (2020). Di sisi lain, pengelolaan aset yang buruk dapat menyebabkan perbedaan antara data fisik dan catatan akuntansi, sehingga berdampak pada kualitas dan integritas laporan keuangan Palepu et al. (2020). Mengingat dampak penelitian ini terhadap kualitas laporan keuangan sangat besar, agar terciptanya laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Selain itu, jika mempertimbangkan permasalahan yang ada, maka sangat penting untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Poae et al., 2023) salah satu cara untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah dengan pengelolaan barang milik daerah secara

akurat dan akuntabel, dengan hasil perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan perencanaan BMD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selaras dengan hasil penelitian Sukmawati et al. (2021) menyatakan bahwa legal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, menurut Dharma et al. (2023) yang menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia pada pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Musi Rawas, bahwa penatausahaan barang milik daerah, kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan *gap research* dan *gap empirik* yang disajikan di atas dengan data di Kabupaten Garut yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan yang sebenarnya, peneliti melihat urgensi untuk melakukan penelitian terkait pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut. Sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menganalisis pengaruh pengelolaan barang

milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Garut. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan representasi numerik yang akurat terkait hubungan variabel yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan sampel jenuh dengan melibatkan 75 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bidang Kasubag Keuangan & BMD atau Pengurus Barang di Kabupaten Garut. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Metode ini memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap pengaruh pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan dan penganggaran, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemeliharaan, pengawasan, pemusnahan terhadap kualitas laporan keuangan meliputi dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan. Penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrumen penelitian, yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator dari variabel pengelolaan barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan. Kuesioner

yang dibuat mencakup pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala Likert untuk menilai tingkat persetujuan responden. Sebelum pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen diuji untuk memastikan akurasi dan konsistensi data. Pengujian ini bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan pengukuran yang dapat berdampak pada temuan penelitian.

Proses penelitian dimulai dengan tahap persiapan, yang melibatkan pengembangan instrumen dan uji coba kuesioner untuk memverifikasi validitas dan reliabilitas. Setelah itu, kuesioner didistribusikan kepada responden yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Pengumpulan data dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan hingga jumlah sampel yang ditargetkan tercapai. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode SEM-PLS untuk menguji hipotesis dan mengeksplorai hubungan antar variabel. Akhirnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efek yang diamati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Kasubag Keuangan & Barang Milik Daerah	69	92%
Pengurus Barang Milik Daerah	6	8%
Total	75	100%

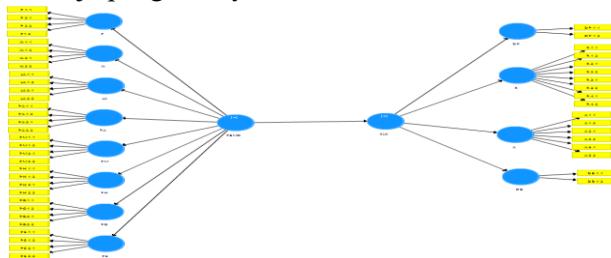
Berdasarkan tabel 3 bahwa karakteristik responden berdasarkan jabatan mayoritas Kasubag Keuangan dan BMD sebanyak 69 orang atau 92%, sedangkan Pengurus Barang Milik Daerah sebanyak 6 orang atau 8%. Data ini dapat

memberikan gambaran dan dapat mempengaruhi persepsi terhadap variabel yang diuji.

Model yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan 2 variabel yaitu pengelolaan barang milik daerah dan

kualitas laporan keuangan, yang dimana masing-masing memiliki dimensi dan juga indikator. Variabel ini diuji pengaruhnya.

Berikut model yang digambarkan menggunakan SEM-PLS.



Gambar 1. Inner Model

Gambar tersebut merupakan Inner Model hasil penghapusan dari indikator yang tidak valid. Uji validitas dilakukan dua kali pengujian yaitu Convergent Validity dengan melihat Loading factor kriteria valid apabila berkorelasi > 0.7 apabila < 0.7 maka indikator dapat dihapus, kemudian melihat tabel *Average Variance Extracted* (AVE) bahwa nilai AVE berdasarkan ketentuan > 0.5 dalam penelitian ini variabel X memiliki nilai AVE sebesar 0.976 sedangkan variabel Y memiliki nilai AVE sebesar 0.663, artinya sesuai dengan kriteia. Kedua dilakukan pengujian *Discriminant validity* dengan melihat nilai Cross Loading berdasarkan ketentuan nilai suatu variabel harus lebih besar dari model lain. Dalam penelitian ini

seluruh variabel dan indikator berkorelasi. Dalam pengujian ini uji validitas secara keseluruhan dikatakan valid.

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan melihat tabel *Composite Reliability* (CR) berdasarkan ketentuan harus > 0.7 dalam penelitian ini nilai CR untuk variabel X sebesar 0.976 dan variabel Y sebesar 0.972 artinya sesuai dengan ketentuan. Kemudian dengan melihat tabel Cronbach's Alpha dalam penelitian ini variabel X memiliki nilai sebesar 0.974 dan variabel Y sebesar 0.970 artinya secara keseluruhan data dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

Hasil dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. Nilai R^2 Sature

Tabel 4. Nilai R Square

Konstruk	R square
Y (Kualitas Laporan Keuangan)	0.818

Berdasarkan tabel R square diatas menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pengelolaan barang milik daerah sebesar 0.818 atau 81%. Untuk sisanya 19%.

Berdasarkan hasil olah data dan

interpretasi secara keseluruhan menayangkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.18, dapat diketahui bahwa nilai P-Value yang membentuk pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap

Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar $0.000 < 0.05$ diikuti dengan nilai T statistics yang positif. Dengan demikian H1 **Diterima**, dimana Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar (2022). Dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan fakta dilapangan bahwa untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas seluruh Sub Bagian Keuangan & BMD melaporkan seluruh asetnya dengan akurat dan lengkap karena aset tetap tercatat dalam neraca pemerintah daerah, laporan keuangan ini akan dijadikan sebagai bahan informasi yang digunakan oleh banyak pihak contohnya dalam pengambilan keputusan, artinya ketika pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan baik maka kualitas laporan keuangan juga akan berkualitas, hal ini sejalan dengan pernyataan ahli yaitu menurut Mardiasmo (2021) yang menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang efektif, yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan di Kabupaten Garut yang berkaitan dengan keakuratan data, masalah ini masih menjadi perbincangan yang kompleks dengan melihat luas wilayah Kabupaten Garut yang cukup besar, apabila dalam pengelolaan asetnya tidak sesuai maka yang dilaporkan pun akan sulit dipahami. Karena untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas itu

harus relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Pengelolaan barang milik daerah memiliki peran yang krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Berdasarkan penelitian di Kabupaten Garut, pengelolaan barang milik daerah cukup efektif diterapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Semakin optimal pengelolaan barang milik daerah semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dapat dikatakan bahwa Sub bagian keuangan dan BMD di Kabupaten Garut memperdulikan perencanaan dan penganggaran, legal audit, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan sebagai wujud agar menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk lebih rinci hasil dari kuesioner yang didukung dengan hasil wawancara dengan pegawai BPKAD Kabupaten Garut bagian Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran Aset menurut hasil wawancara dengan Pak Chandra bagian Barang Milik Daerah bahwa seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Garut telah merencanakan dan menganalisis kebutuhan aset dalam laporan keuangan, akan tetapi masih terdapat beberapa SKPD yang tidak sesuai dengan rencana dalam laporan keuangan, dan berbeda antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasinya.
2. Inventarisasi Aset, berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian besar SKPD telah menyampaikan aset dengan sebenarnya, akan tetapi masih banyak

- SKPD yang tidak melaporakan dengan sebenarnya dimana hal ini dilihat bersadarkan hasil pemeriksaan dari BPK masih banyak aset dalam KIB (Kartu Inventarisasi Barang) terdapat SKPD yang melaporkan kondisi barang baik akan tetapi faktanya barang dalam kondisi buruk, begitupun sebaliknya
3. Legal Audit, berdasarkan hasil wawancara bahwa seluruh SKPD telah patuh terhadap regulasi dalam pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi masih banyak aset – aset daerah yang belum bisa diamankan dimana masih banyak aset seperti tanah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan.
 4. Penilaian Aset, berdasarkan hasil wawancara bahwa seluruh SKPD telah melakukan penilaian sesuai dengan yang berlaku dimana penialain ini dilakukan oleh tim penilai pusat.
 5. Pemanfaatan Aset, berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian besar SKPD telah memanfaatkan BMD secara produktif, akan tetapi masih terdapat beberapa SKPD yang tidak memanfaatkan BMD secara produktif dimana masih banyak bangunan – bangunan yang tidak terpakai dengan baik.
 6. Pemeliharaan Aset, berdasarkan hasil wawancara bahwa seluruh SKPD telah membuat rencana untuk pemeliharaan aset, akan tetapi masih belum responsif terhadap kerusakan seperti data dari hasil pemeriksaan data tidak sesuai barang yang baik atau barang yang rusak.
 7. Pengawasan Aset, berdasarkan hasil wawancara bahwa seluruh SKPD telah menggunakan sistem informasi yaitu ATISISBADA dimana sistem ini akan merekap seluruh data di tiap tiap SKPD secara *up to date*.
 8. Pemusnahan Aset, berdasarkan hasil wawancara bahwa seluruh SKPD telah melakukan pemusnahan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melibatkan saksi resmi.
- Hal ini juga didukung dengan hasil pengujian *second order* dalam metode SEM PLS, bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sebagai berikut :
1. Dimensi Perencanaan dan Penganggaran Aset memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada penelitian di Pemerintahan Kabupaten Garut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharofah & Kaukab (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan aset dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga berhasil mengatasi kesenjangan dari penelitian Poae et al. (2023) dengan membuktikan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
 2. Dimensi Inventarisasi Aset memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada penelitian di pemerintahan Kabupaten Garut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati et al. (2021) yang menyatakan bahwa inventarisasi aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara menagamanatkan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan sebaik-baiknya, artinya ketika data barang milik daerah dicatat dengan

- akurat dan lengkap akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
3. Dimensi Legal Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada penelitian di Pemerintahan Kabupaten Garut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruda et al. (2023) yang menyatakan bahwa legal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga berhasil mengatasi kesenjangan dari penelitian Sukmawati et al. (2021) yang menyatakan legal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam legal audit diperlukan kepatuhan terhadap regulasi dan pengamanan hak atas aset, bahwa aset yang tercatat harus memiliki status hukum yang jelas seperti sertifikat tanah, dokumen pemebelian atau perjanjian sewa.
 4. Dimensi Penilaian Aset memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada penelitian di Pemerintahan Kabupaten Garut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruda et al., (2023) yang menyatakan penilaian aset berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
 5. Dimensi Pemanfaatan Aset memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada penelitian di Pemerintahan Kabupaten Garut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Poae et al. (2023) yang menyatakan pemanfaatan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
 6. Dimensi Pemeliharaan Aset memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada penelitian di Pemerintahan Kabupaten Garut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Niliani (2019) yang menyatakan pemeliharaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya dengan melakukan pemeliharaan secara teratur, responsivitas terhadap kerusakan, ketika pemerintah respon terhadap kerusakan maka aset akan tercatat dalam kondisi baik ataupun buruk maka aset akan cepat untuk diidentifikasi.
 7. Dimensi Pengawasan Aset memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada penelitian di Pemerintahan Kabupaten Garut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Poae et al. (2023) yang menyatakan pemanfaatan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ketika Pemerintah Daerah dapat mengawasi seluruh SKPD maka aset yang tercatatpun akan relevan sesuai dengan yang sebenarnya.
- Dimensi Pemusnahan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan yang dilakukan pada penelitian di Pemerintahan Kabupaten Garut. Bahwa dalam laporan keuangan diperlukan pencatatan yang terperinci, seperti aset yang harus dimusnahkan tercatat dengan teliti dalam laporan keuangan agar mudah dipahami

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum responden memberikan tanggapan baik pada indikator penelitian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimensi perencanaan dan penganggaran, legal audit, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan dengan dimensi terendah adalah Pemeliharaan Aset. Hal didukung dengan hasil wawancara bahwa seluruh SKPD telah melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik, akan tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan seperti Inventarisasi Aset, dan Pemanfaatan Aset
 2. Kemudian secara umum responden memberikan tanggapan baik pada indikator Kualitas Laporan Keuangan, dimensi relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan dengan dimensi terendah yaitu dapat dibandingkan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bahwa seluruh SKPD baik dalam laporan keuangan akan tetapi masih rendah dalam relevansi dan keandalan data.
 3. Hasil olah data menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut sebesar 81%.
- Administrasi*, 10(3), 390–413.
- Alrahim, A. A., & Wibowo, P. (2022). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 80–93. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18579>
- Bastian, I. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Penerbit Andi.
- Dewi, W. K., Erniwati, E., & Novia Putri, C. (2023). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 19–27. <https://doi.org/10.59963/jpema.v5i1.130>
- Djanegara, H. M. S., SE, A., & MM, C. A. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Kesatuan Press.
- Firmansyah, A., Wibowo, P., & Puspitarini, I. (2020). Implementation of accrual based accounting on regional property in Indonesia: competence employees and organizational commitments perspective. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 9502–9512.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C., & Licari, M. J. (2018). *The public administration theory primer*. Routledge.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi, M. N. (2013). Analisis Manajemen Aset Tetap Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek*

- Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348.
- Kaomaneng, I. S., Jenny Morasa, S. E., CA, M. S. A., Hendrik Gamaliel, S. E., & CA, R. L. S. E. M. M. A. (2023). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM SEKTOR PUBLIK*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Moe, R. C., & Gilmour, R. S. (2015). Rediscovering principles of public administration: The neglected foundation of public law. In *Public Administration and Law* (pp. 237–260). Routledge.
- Mulyati, N. S., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Akuntapedia*, 1(1).
- Musthafa, H. (2017). *Manajemen keuangan*. Penerbit Andi.
- Palepu, K. G., Healy, P. M., Wright, S., Bradbury, M., & Coulton, J. (2020). *Business analysis and valuation: Using financial statements*. Cengage AU.
- Pranata, Y. (2021). *Perkembangan standar akuntansi pemerintahan dan peluang riset*. 1(3), 29–34.
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279.
- Rosenbloom, D., Kravchuk, R., & Clerkin, R. (2022). *Public Administrastion* (9th ed.). <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003198116>
- Siregar, D. D. (2016). *Otonomi dan pengelolaan aset daerah*. Sinergi Manajemen Aset (SIMA) bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Penilai Indonesia (YAPPI). <https://books.google.co.id/books?id=UxBFnQAACAAJ>
- Sjamsuddin, S. (2016). *Antologi Administrasi Publik & Pembangunan* (F. Amin (ed.)). Universitas Brawijaya Press.
- Sudaryono, Y., Sjarif, D., & Sofiati, A. N. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (P. Christian (ed.)). Cv. ANDI OFFSET.
- Sugiaman, A. G. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Vidyasari, F. N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).